



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLDA JATIM POLRI TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Polda Jatim Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/541/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Polri gelombang III Tahun 2016-2019, meliputi 8 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 *Quick Wins* yang tidak lain sebagai aktualisasi dari 8 area perubahan bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan publik, dengan total pengungkit **mencapai nilai 56,4%** (kategori A=memuaskan).

Kedelapan area perubahan tersebut menjadi proses pengungkit dan diyakini dapat mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi Polri yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya, sebagaimana dalam program Kapolri "PROMOTER" dan searah dengan kebijakan Polri dalam Renstra Polri Tahun 2016-2019. Dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi 8 program yaitu Program Revolusi Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundang-undangan dan Pelayanan publik.

Apresiasi dan penghargaan yang diberikan Menteri PAN dan RB kepada Polda Jatim dan jajaran, Satker/Satwil yang memperoleh predikat sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ada enam Satwil yaitu:

yaitu

yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polres Madiun, Polres Kediri, Polres Blitar Kota, Polres Jombang, dan Polres Bangkalan, serta predikat Satker/Satwil sebagai Zona Integritas (ZI) yang menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ada tiga Satwil yaitu Polres Lamongan, Polres Mojokerto dan Polres Malang, merupakan salah satu bukti keberhasilan RBP di Polda Jatim.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

maksud dibuat laporan ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Tahun 2021 di Polda Jatim.

b. Tujuan

tujuan dibuat laporan ini untuk memberikan masukan kepada Pimpinan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Tahun 2021, di Polda Jatim.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di Polda Jatim Tahun 2021.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Pedoman Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
- c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/541/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019;
- d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/825/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang petunjuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

e. Surat

- e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Sprin/2300/XI/2015 tentang penunjukan Tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polri Tahun 2016-2019;
- f. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Sprin/962/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang daftar nama pejabat penanggung jawab Tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polda Jatim gelombang III Tahun 2016-2019;
- g. Surat Asrena Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: B/1163/X/REN.2.3./2019/Srena tanggal 9 Oktober 2019 tentang undangan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Road Map Reformasi Birokrasi Polri tahun 2019.

5. Sistematika

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Target pencapaian Reformasi Birokrasi Polri gelombang III tahun 2016-2019, periode Tahun 2019 di Polda Jatim;
- c. Bab III : Hasil yang dicapai;
- d. Bab IV : Program *Quick Wins*;
- e. Bab V : Penutup.

BAB II

TARGET PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI POLRI TAHUN 2021 DI POLDA JATIM

1. Komponen Pengungkit

a. Program I: Revolusi Mental Aparatur.

Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan Polri Polda Jatim, dengan digunakan dua indikator kegiatan,yaitu:

1) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) pembuatan kurikulum dan modul Diktuk target sebanyak 14.820 modul, modul prolat sebanyak 67;
- b) dikjur 347 orang, Perwira 210, Bintara 133 orang dan PNS 4 orang;
- c) dibentuk TOT tingkat Polres, sebanyak 39 Polres;
- d) dibuat 1 dokumen Monev TOT;
- e) sertifikasi Gadik 107 orang, meliputi perwira 52 orang, Bintara 47 orang dan PNS 9 orang dan pengasuh pengasuh Diktuk 3 orang.

2) pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) di bentuk Role Model/agen perubahan pada tingkat Polda/Polres sebanyak 25 orang (perwira);
- b) pelatihan fungsi teknis Polri di tingkat Polres, sebanyak 39 Polres.

b. Program II: Penguatan Sistem Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi sasaran yang akan dicapai yaitu :

- 1) mempertahankan



REFORMASI BIROKRASI POLRI

POLDA JATIM



- 1) mempertahankan penilaian laporan Keuangan oleh BPK dengan predikat WTP;
- 2) meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan 6 (enam) kegiatan indikator:

- 1) pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) kapabilitas APIP Polri ke level II:
 - (1) pembuatan 1 piagam audit intern;
 - (2) peningkatan kompetensi dilaksanakan 1 kompetensi bersertifikasi JFA, 1 sertifikasi audit investigasi, 1 sertifikasi audit PBJ, 1 sertifikasi rewiu Lapkeu, 1 sertifikasi audit dasar;
 - (3) di buat 3 peraturan Kapolda/Irwasda;
 - (4) di buat 1 peta resiko objek pemeriksaan tahunan;
 - b) di buat 2 laporan hasil Wasrik tahunan, 1 laporan hasil review (jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti);
 - c) pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui ITK Polri dengan melakukan uji data persepsi di 5 Polres yaitu Polres Kediri, Kediri Kota, Blitar, Blitar Kota dan Tulung Agung;
 - d) penetapan WBK target pada 18 Satker/Satwil yaitu Ditpolair Polda Jatim, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jombang, Pasuruan, Pasuruan Kota, Probolinggo, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, Madiun, Madiun Kota, Ngawi, Magetan, Blitar, Blitar Kota, Kediri, Ponorogo dan Tulung Agung.
Penetapan WBBM target pada 11 Satwil Yaitu Polres Lamongan, Mojokerto, Mojokerto Kota, Tuban, Bojonegoro, Malang, Malang Kota, Batu, Banyuwangi, Situbondo dan Trenggalek ;
 - e) pemenuhan LHKPN yang wajib mengisi pada Satker dan Satwil Polda Jatim, target sejumlah 1440;
 - f) mempertahankan



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- f) mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100;
 - g) laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik, target 1 dokumen.
- 2) pelaksanaan *Whistle blowing System (WBS)*;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa di buat 1 laporan sharing informasi *WBS online* antara Polri, KPK dan LPSK, dan terkoneksi 1 sistem *WBS online* tingkat Mabes Polda Jatim;
 - 3) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa telah di buat laporan benturan kepentingan, target 1 laporan;
 - 5) pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa di bentuk SPIP di 76 Satker tingkat Polda dan Polres;
 - 6) penanganan pengaduan masyarakat.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa telah terbentuk Dumas *Online* dan laporan Dumas online, target 1 laporan.
- c. Program III: Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
- Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan system manajemen kinerja organisasi. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan ukuran keberhasilan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), pencapaian program ini digunakan satu kegiatan indikator yaitu pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa :
- 1) dokumen perjanjian kinerja sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2015, dengan target 76 (Satker dan Satwil jajaran);
 - 2) tersedia alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP dan GPP pada Polda Jatim dengan target 76 (Satker dan Satwil jajaran);
 - 3) pelatihan pengadaan barang dan jasa dan peserta pelatihan bersertifikasi PBJ bagi Personel Polri, target 116 orang;
 - 4) 39 Polres jajaran dan 34 Satker Polda Jatim menggunakan *E-Proc*;
 - 5) Naskah IKU serbanyak 76 di Satker dan Polres jajaran Polda Jatim.

d. Program



REFORMASI BIROKRASI POLRI

POLDA JATIM



d. Program IV: Penguatan Kelembagaan.

Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah terwujudnya organisasi Polri Polda Jatim yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur Polri yang tepat fungsi tepat ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) yaitu evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polda Jatim. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- 1) peningkatan tipe 2 Polres menjadi Polresta (Polresta Malang Kota dan Polresta Banyuwangi), pembentukan 3 Polsubsektor baru hasil dari evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri;
- 2) dibuat 2 rekomendasi sinergi tingkat pusat dan daerah (rekom Walikota, Bupati dan DPRD).

e. Program V: Penguatan Tatalaksana.

Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK (Tehnologi Informasi Kepolisian).

Sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan yang baik;
- 2) terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu.

Atas dasar tersebut, maka pencapaian program ini menggunakan empat kegiatan indikator yaitu:

- 1) perluasan penerapan *E-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa :
 - a) Menerapkan LPSE pengadaan barang dan jasa, target sejumlah 76 Satker dan Polres jajaran;

b) penerapan

- b) penerapan system pengelolaan informasi dan dokumentasi (e-document & e-office) pada 28 Satker Polda, 9 RS Bhayangkara dan 39 Polres jajaran Polda Jatim.

2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) SOP Satker Polda Jatim dengan target 37 SOP (28 Satker Polda, 9 RS Bhayangkara);
- b) penghitungan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja, target 76 dokumen 28 Satker Polda, 9 RS Bhayangkara, 39 Polres).

3) Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Infomasi:

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), target 248 kali pengumuman;
- b) evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polda Jatim, target 2 dokumen laporan evaluasi;
- c) evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), target 2 dokumen laporan evaluasi.

4) penerapan system kearsipan yang handal.

Pengukuran indicator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa terbentuknya *e-office* pada tingkat Satker Polda Jatim, dengan target 28 Satker dan 39 Polres.

f. Program VI: Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jatim. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri, pencapaian program ini menggunakan 8 kegiatan indikator:

- 1) perbaikan



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- 1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa di buat 2 Surat Telegram tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personil;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) 10% anggota Polda Jatim yang direkrut dari wilayah pesisir, target 1 kali;
 - b) 1 Satker Polda dan 39 Polres sudah menggunakan teknologi *Online*, dengan target 40;
 - c) pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun, dengan target 40 (1 di tingkat Polda dan 39 Polres jajaran).
- 3) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *Assessment Center*.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) menetapkan Kebijakan pengembangan *assessment center* dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012, dengan melaksanaakn uji kompetensi jabatan dengan menggunakan system *Computer Assisted Test* (CAT) di tingkat Polda , target 6 kali;
 - b) pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda (berdasarkan permintaan dari Mabes Polri), dengan target 1 anggota.
- 4) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja, target 1 laporan hasil evaluasi Diklat;
- 5) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

a) penerapan

- a) penerapan prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi secara terbuka untuk pengisian jabatan struktural dan fungsional, target 2 kali;
 - b) penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri, target 1 kali.
- 6) menyusun dan menetapkan pola karier.
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi: penyusunan dan penetapan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu, dengan target 5 kali seleksi;
- 7) pengukuran *GAP Competency* (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assesement, dengan target 1 kali Monev;
- 8) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
 Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Kerjasama pendidikan dan pelatihan perguruan tinggi, dengan instansi terkait guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan, target 1 MOU.
- g. Program VII: Penguatan Peraturan Perundang–Undangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis kebutuhan publik.

Sasaran yang akan dicapai tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis, sinkron dan pelaksanaannya efektif dan efisien.

Atas dasar tersebut, maka pencapaian program ini melihat kondisi apakah menyempurnakan/mengubah peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain.

Polda Jatim melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi Perkap e *Dumas* dengan target sejumlah 1 Peraturan Kapolda/ Kasatker.

h. Program

h. Program VIII: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus. Sasaran yang akan dicapai yaitu: meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, prosentase tingkatkepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tindak lanjut pengaduan pelayanan public dan *Public Service Index* dengan menetapkan Zona Hijau di Satpas Ditlantas Polda Jatim dan pelayanan SKCK, maka untuk mengukur pencapaian program ini didukung oleh 7 fungsi yaitu:

1) Bidang Lalu Lintas.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) koordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM, target 1 dokumen;
- b) penambahan mobil SIM Keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, target 1 mobil SIM keliling;
- c) unit layanan SIM *Online* sebanyak 38 Satpas Polres jajaran;
- d) pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Polda Jatim, target 114 orang;
- e) Standarisasi tata layanan dan gedung di 1 Kantor Satpas tingkat Polda Jatim, target 2;
- f) mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Jatim di 38 Satpas;
- g) *Score Survey* Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target 1 Polda dan 38 Polres;
- h) Penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB, target 38 Polres;
- i) pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbit BPKB dan STNK di Polda dan Polres jajaran, target 4 orang;
- j) operasional Regident Ranmor yang terintegrasi di Polda Jatim, target 38;
- k) pelayanan Samsat bersih dari calo, target 38 Polres.

2) Bidang



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



2) Bidang Intelkam.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) Membangun akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK antara lain sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK dengan target 1 di Satker Polda Jatim dan 39 Polres;
- b) terimplementasinya *Intregated* SKCK Online, sampai dengan tingkat Polsek dengan target 1 tingkat Polda, 39 Polres dan 66 Polsek;
- c) laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di SKCK Polda Jatim dan 39 Polres, target 1 laporan SKM di SKCK Polda ;
- d) Implementasi *Intregated* SKCK online, target di 173 Polsek;
- e) system *First In First Out* dilevel Polda dan Polres, target 1 di tingkat Polda, 39 Polres.

3) Bidang Binmas.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

Unit mobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres, dengan target 1.284 SPM di jajaran Polda Jatim.

4) Bidang Polairud.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) Pengamanan area *Hot Spot 10* area prioritas, area labuh jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah perairan berdasarkan laporan hasil kegiatan pengamanan di Tahun 2019, dengan target 3.600 giat patroli;
- b) Kegiatan Polmas dan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni, target 720 giat Polmas Perairan dan 3 giat sambang nusa.

5) Bidang Sabhara.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) sosialisasi Peraturan Kabaharkam Polri tentang Patroli, target 1 giat sosialisasi;
- b) tergelarnya Turjawali di tempat rawan kriminalitas dan kemacetan yaitu dengan target pengaturan : 18.957 kali Penjagaan : 15.530 kali Pengawalan : 159 kali, Patroli : 28.480 kali, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan;

c) patroli

- c) patroli sesuai route yang telah ditentukan dengan kecepatan mendatangi TKP 15-20 menit, target sejumlah 6 giat.
- 6) Bidang Reskrim.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) penerapan SP2HP online di seluruh Wilayah Indonesia melalui Pusiknas, dengan target 1 laporan di tingkat Polda dan 39 Polres;
 - b) pengesahan revisi Perkap, target 1 Perkap/Perkaba;
 - c) sertifikasi penyidik Polri dan PPNS, target 196 orang.
- 7) Bidang Brimob.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) menyiagakan Unit siaga di tiap kesatuan SatBrimob Polda Jatim target 12 Unit SAR di Subden (Kompi), 1 Unit KBR pada Den Gegana;
 - b) Laporan hasil Quick Respon JIBOM, target 1 Laporan;
 - c) meningkatkan back up Kewilayahan dan unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, target 1 laporan hasil.

2. Komponen Hasil

- I. **BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**
 - 1. Indeks Reformasi Birokrasi Polri;
 - 2. Indeks profesionlitas Aparatur;
 - 3. Indeks e-Government Polri.
- II. **BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**
 - 1. Opini WTP dari BPK;
 - 2. Tingkat Kapabilitas;
 - 3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP;
 - 4. Nilai AKIP;
 - 5. Penggunaan e procurement.
- III. **BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS**
 - 1. Indeks Integritas Pelayanan Publik;
 - 2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - 3. Presentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik;
(yang melaksanakan penilaian dari Tim Srena Mabes Polri).



BAB III
HASIL YANG DICAPAI
REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III
TAHUN 2016-2019 PERIODE 2019 DI POLDA JATIM

Hasil yang dicapai pada pelaksanaan RBP tahun 2019 di Polda Jatim komponen pengungkit dengan nilai 56,4% dari bobot 60%, sedangkan komponen hasil penilaian dari Srena Polri.

1. Komponen Pengungkit, mencapai 56,40% dari bobot 60% adalah sebagai berikut:

a. Program I Revolusi Mental Aparatur

dimana Program I, mencapai 5,05% dari target 5%.

Pencapaian pada dua indikator yaitu:

1) pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas, dapat terlaksana sebanyak 4 aksi yaitu sebagai berikut:

- a) selama Tahun 2019, penyusunan modul Diktuk, sebanyak 17.125 modul, modul prolat sebanyak 67 masing-masing 1 kurikulum;
- b) melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi sebanyak 347 orang, meliputi: Perwira 210 orang, Brigpol sebanyak 133 orang dan PNS sebanyak 4 orang;
- c) membentuk sebanyak 39 TOT revolusi mental, tingkat Polda dan Polres;
- d) melaksanakan sertifikasi gadik dan gadikan, gadik perwira sebanyak : 52 orang, Brigadir 47 orang, PNS 9 orang dan pengasuh Diktuk sebanyak 3 orang.

2) pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

Dapat terlaksana seluruh aksi sebanyak 2 aksi sebagai berikut:

- a) pembentukan Role Model/agen perubahan pada tingkat Polda/Polres sebanyak 25 orang;
- b) pelaksanaan pelatihan VCD fungsi teknis Polri (5 fungsi teknis) pada tingkat Polda dan Polres selama Tahun 2019, 39 Polres melaksanakan pelatihan VCD.

b. Program II Penguatan Sistem Pengawasan.

dimana



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



dimana Program II mencapai 11,92% dari target 12%.

Pencapaian target didukung pada enam kegiatan indikator yaitu:

- 1) pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - a) meningkatkan kapabilitas APIP Polri ke Level II:
 - (1) pembuatan piagam audit internal, sebanyak 1 piagam;
 - (2) peningkatan kompetensi, telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 1 JFA, 1 bersertifikasi audit investigasi, 1 bersertifikasi audit PBJ, 1 Sertifikat review Lapkeu, 1 sertifikat audit dasar;
 - (3) telah menerapkan 3 Peraturan Kapolri/Irwasum;
 - (4) pembuatan Peta resiko objek pemeriksaan, sebanyak 1 daftar (Polda dan Polres).
 - b) penyelenggaraan Wasrik, reviu, pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sejumlah 2 laporan hasil Wasrik tahunan, 1 laporan hasil Review, 100% ITW 90% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat "BB" (minimal 72);
 - c) ITK pada tahun 2019 melalui ITK Polri dengan melakukan uji data persepsi di 5 Polres yaitu Polres Kediri, Kediri Kota, Blitar, Blitar Kota dan Tulung Agung;
 - d) penetapan WBK pada 6 Satwil yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jombang, Bangkalan, Madiun, Blitar Kota, dan Kediri.
Penetapan WBBM 3 Polres Yaitu Polres Lamongan, Mojokerto, dan Malang;
 - e) pemenuhan LHKPN, pejabat pada eselon I dan para Kasatker yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN, sebanyak 1.440 orang;
 - f) pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan, mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0, Polda Jatim mendapatkan predikat WTP : 100;
 - g) laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik sudah disusun 1 dokumen.

DATA



REFORMASI BIROKRASI POLRI
POLDA JATIM



DATA PENINDAKAN TERHADAP ANGGOTA TAHUN 2018 DAN 2019

NO	JENIS	TAHUN			
		2018		2019	
		KASUS	SELESAI	KASUS	SELESAI
1.	Pelanggaran disiplin	436	370	357	229
2.	Pelanggaran kode etik	134	111	137	63
3.	Pidana	9	1	11	2

- 2) pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS).
laporan sharing informasi *WBS online* antara Polri, KPK dan LPSK sebanyak 1 kali sosialisasi;
- 3) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan kepentingan, sudah dilaksanakan dan laporan benturan kepentingan, sejumlah 1 laporan benturan kepentingan sudah disusun;
- 4) pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa SPIP di tingkat Polda, baru terbentuk pada level 1;
- 5) penanganan pengaduan masyarakat.
pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa telah terbentuk Dumas *Online* dan laporan Dumas *Online* dilingkungan Satker dan Satwil jajaran Polda Jatim, dengan mengacu pada peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Polri, telah disusun.
- 6) penanganan pengaduan masyarakat.
bahwa telah di buat 1 laporan Dumas *Online*.

DATA



REFORMASI BIROKRASI POLRI
POLDA JATIM



DATA PERBANDINGAN DUMAS TAHUN 2018 : 2019

NO.	JENIS PELANGGARAN	TAHUN	
		2018	2019
1.	Lahgunwen	25	93
2.	Yanmas/lambat pelayanan	112	60
3.	Korupsi/pemerasan/penyuapan/pungli	32	70
4.	Tanah	6	40
5.	Hukum/Ham	127	192
6.	Personel/kepegawaian	0	0
7.	Lain-Lain	9	29
Jumlah		311	484

LAPORAN PENANGANAN DUMAS TAHUN 2019

NO.	BULAN	TINJUT	TANGGAPAN	STATUS TANGGAPAN			BAT
				P	SB	STB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	296	18	8	3	7	278
2.	Pebruari	10	32	15	6	12	256
3.	Maret	43	71	33	13	26	228
4.	April	35	0	0	0	0	263
5.	Mei	26	49	22	9	18	240
6.	Juni	9	2	1	0	1	247
7.	Juli	23	68	31	12	25	202
8.	Agustus	7	29	13	5	11	180
9.	September	30	92	42	16	33	118
10.	Oktober	5	55	25	10	20	68
11.	Nopember	0	68	31	12	25	0
12.	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		484	484	222	86	176	0

Keterangan:

P : Proses

SB : Selesai Benar

SBT: Selesai Tidak Benar

BAT: Belum Ada Tanggapan

c. Program



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- c. Program III Penguatan Akuntabilitas Kinerja dimana Program III total capaian 6,03% dari bobot 6%. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
- 1) dokumen perjanjian kinerja sudah sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2015, sebanyak 76 dokumen (Satker Polda dan Polres);
 - 2) alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP dan GPP pada Polda dan Polres jajaran, sejumlah 76;
 - 3) personel Polda Jatim yang mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa sejumlah 120 orang, sedangkan yang lulus 26;
 - 4) menggunakan *E-Proc*, sejumlah 39 Polres jajaran dan 34 Satker Satker Polda Jatim;
 - 5) naskah IKU, sudah disusun sejumlah 76 yaitu Satker Polda Jatim dan Polres jajaran.
- d. Program IV Penguatan Kelembagaan.
Dimana Program IV mencapai 6% dari bobot 6%, pencapaian target didukung kegiatan Indikator yaitu evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polda Jatim meliputi:
- 1) peningkatan tipe 2 Polres menjadi Polresta, pembentukan 3 Polsubsektor baru hasil dari evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri;
 - 2) di buat 2 rekomendasi sinergi tingkat pusat dan daerah (rekom walikota, Bupati dan DPRD).
- e. Program V Penguatan Tata laksana
dimana Program V mencapai 5,00% dari bobot 5%. Pencapaian target didukung dari empat kegiatan indikator, yaitu:
- 1) perluasan penerapan *E-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan :
 - a) menerapkan LPSE pengadaan barang/jasa, sejumlah 76 Satker Polda dan Polres jajaran;
 - b) telah diterapkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (*e-office*) pada 28 Satker Polda, 9 RS Bhayangkara dan 39 Polres jajaran Polda Jatim.

2) Penerapan.....



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- 2) Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) telah di buat SOP masing-masing di 28 Satker Polda Jatim, 9 SOP RS Bhayangkara;
 - b) penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja dengan tersusunnya Analisa Beban Kerja (ABK), sebanyak 76 dokumen sudah terealisasi.
- 3) Implementasi Undang-undang keterbukaan Informasi.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:
 - a) telah dilaksanakan 248 pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh Satker di lingkungan Polda dan Polres jajaran dengan menggunakan aplikasi SIRUP;
 - b) laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polda Jatim, sejumlah 2 dokumen;
 - c) laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sejumlah 2 dokumen;
 - d) penerapan sistem kearsipan yang handal.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa terbangunnya *e office* yang terintegrasi di 28 Satker Polda dan 39 Polres.
- f. Program VI Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
dimana Program VI mencapai 11,56% dari target 15 % Sasaran yang akan dicapai adalah profesionalisme anggota Polri pada Polda Jatim dan jajaran dalam melaksanakan tugas, maka pencapaian target ada 8 kegiatan yaitu:
 - 1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri Polda Jatim.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel, membuat 2 Surat Telegram Kapolda Jatim tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional.
 - 2) perumusan



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) rekrutmen anggota Polri yang berasal dari wilayah pesisir/pulau terluar, Tahun 2019 belum terlaksana;
- b) pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri melalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda Jatim dan 39 Polres menggunakan teknologi Online, sudah dilaksanakan secara keseluruhan 100% melalui (Website: www.penerimaan.polri.go.id) sebanyak 40 (1 Polda dan 39 Polres);
- c) Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen di Tahun 2019, terlaksana 100%, sebanyak 40 kali (1 Polda dan 39 Polres);

- 3) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *Assessment Center*.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- a) menetapkan Kebijakan kompetensi dalam pengembangan *Assessment Center* dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi perkap No 12 Tahun 2012 Polda, yaitu 6 kali melaksanakan uji kompetensi jabatan Wakapolres, Kabagops, Kabag sumda, Kasat Lantas, Kasatreskrim dan Kapolsek urban sesuai dengan tingkat kepangkatan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);
- b) Tahun 2019 belum melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi assessor di tingkat Polda Jatim karena belum adanya/menunggu instruksi dari Mabes Polri.

- 4) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja, dengan melaksanakan 1 kali Monev Diklat.

5) Penerapan



- 5) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi yaitu:

- a) melaksanakan 2 kali penerapan prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi secara terbuka untuk pengisian jabatan struktural dan fungsional di Polda Jatim;
 - b) penerapan tim pengawasan pelaksanaan yaitu melibatkan dari Itwasda dan Bidpropam dalam proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin *system merit* dalam Binkar personel Polda Jatim, ada 1 laporan tim pengawasan.
- 6) menyusun dan menetapkan pola karier.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu, dengan hasil giat 6 kali seleksi/uji kompetensi;
- 7) pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assesement, telah dibuat 1 laporan hasil monitoring dan evaluasi;
- 8) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa Kerjasama pendidikan dan pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan dimana pelaksanaanya dilakukan oleh Mabes Polri, sedangkan di Polda Jatim belum melaksanakan MoU, namun melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Petrokimia Gresik tentang penyaluran tenaga kerja anggota Polri.

g. Program VII Penguatan Peraturan Perundang–Undangan

dimana Program VII mencapai 5% dari target 5 %, sasaran yang akan dicapai yaitu peraturan perundang-undangan yang harmonis, sinkron dan pelaksanaannya efektif dan efisien. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini menggunakan kegiatan indikator dengan dilaksanakannya 1 kali harmonisasi dan sinkronisasi Perkap tentang *e Dumas* dengan hasil 95%.

h. Program



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- h. Program VIII Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
dimana Program VIII mencapai 5,8 dari target 6,0%, terdapat 7 fungsi yaitu sebagai berikut:
- 1) Bidang Lalu Lintas, tercapai 0,78% dari target 0,86%.
 - a) pengembangan SIM online (pelayanan perpanjangan SIM):
 - (1) telah dibuat 1 dokumen koordinasi dengan dinas kependudukan terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM;
 - (2) tahun 2019 belum ada penambahan unit mobil SIM Keliling pada tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - (3) dibentuk unit layanan SIM Online sebanyak 38 Satpas;
 - (4) peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui 1 kali pelaksanaan pelatihan kompetensi penguji SIM, sebanyak 114 personel;
 - (5) standarisasi tata layanan dan gedung Kantor layanan Satpas dan gedung di 2 Polres yaitu Polresta Banyuwangi dan Mojokerto Kota;
 - (6) melaksanakan Zona bebas percaloan layanan SIM di 38 Satpas Polda Jatim;
 - (7) melaksanakan Survey indeks kepuasan masyarakat di SKUKP Ditlantas Polda Jatim dan terhadap pelayanan SIM di 38 Polres dengan nilai rata-rata baik (skor 82,5%).
 - b) penyempurnaan sistem pelayanan BPKB dan STNK online secara integrasi dengan Korlantas Polri, penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di Polda Jatim, masih menunggu dari Mabes Polri.
 - (1) peningkatan profesionalitas sumber daya petugas penerbit BPKB dan STNK melalui kompetensi 2 pers penerbit BPKB dan 2 pers penerbit STNK;
 - (2) terintegrasinya sistem pelayanan BPKB dan STNK Polda dengan Polres jajaran, sejumlah 38 Polres;
 - (3) pelayanan Samsat bersih dari calo, sudah dibentuk sejumlah 38 Polres.

2) Bidang



REFORMASI BIROKRASI POLRI

POLDA JATIM



2) Bidang Intelkam, tercapai 0,86 % dari target 0,86%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi yaitu:

- a) terbangunnya akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK:
 - (1) terlaksananya Sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di Polda Jatim dan 39 Polres;
 - (2) terimplementasinya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara *Online*, sejumlah 1 Satker Ditintelkam, 39 Polres dan 66 Polsek, jumlah seluruhnya 106;
 - (3) survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2019 oleh KemenPan RB dan Baintelkam Mabes Polri telah dilakukan pada 1 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat .
- b) membangun Link Sistem *Online* tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas, yaitu terimplementasinya Integrated SKCK *Online* pada tingkat Polsek sebanyak 173 Polsek jajaran Polda Jatim;
- c) penerapan Sistem *First In First Out (FIFO)* di SKCK Polda dan 39 Polres.

3) Bidang Binmas, tercapai 0,86% dari target 0,86%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) dengan Unit mobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres, yaitu Polres jajaran 39 Unit mobil SPM di Polres dan 1 Unit di SPKT Polda Jatim, sejumlah 1.284 Unit mobile SPM.

4) Bidang Polairud, tercapai 0,75 % dari target 0,86%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi yaitu:

- a) peningkatan pengamanan area *Hot Spot* 10 area prioritas, dengan sasaran : daerah area labuh jangkar lego jangkar, pemeriksaan kapal-kapal niaga wilayah pelabuhan tahun 2019 melaksanakan patroli sebanyak 3.298 giat patroli;
- b) peningkatan giat Polmas (kegiatan *Quick Wins*) dan sambang nusa ke pulau kecil terluar berpenghuni dan tidak berpenghuni, dilaksanakannya kegiatan Polmas Perairan sebanyak 600 kegiatan Polmas dan 3 kegiatan sambang nusa.

5) Bidang



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- 5) Bidang Sabhara, tercapai 0,57% dari target 0,86%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi yaitu:

- dilaksanakan 1 kali sosialisasi Perkabaharkam tentang Patroli pada tingkat Polda dan Polres;
- laporan giat pengaturan : 18.957 kali Penjagaan : 15.530 kali Pengawalan : 159 kali, Patroli : 28.480 kali, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan.

HASIL GIAT KEPOLISIAN FUNGSI SABHARA TH 2018 DAN TH 2019

NO	GIAT KEPOL	TH 2018	TH 2019	TREND
1.	PENGATURAN	9.151	18.957	NAIK 107,15 %
2.	PENJAGAAN	13.417	15.530	NAIK 15,74%
3.	PENGAWALAN	226	159	TURUN 29,64%
4.	PATROLI	27.847	28.480	NAIK 2,27%

- 6) Bidang Reskrim tercapai 0,86 % dari target 0,86%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- melaksanakan monitoring SP2HP online di Polda Jatim dan 39 Polres, 1 dokumen laporan;
- revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP dengan melaksanakan sosialisasi 14 Perkap dan 9 Perkaba, 30 SOP (selama Tahun 2019 melaksanakan 1 revisi perkaba);
- dilaksanakan Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS, di tingkat polres sebanyak 196 penyidik bersertifikasi:
 - Ditreskrimum : 31 orang;
 - Ditreskrimsus : 72 orang;
 - Ditnarkoba : 53 orang;
 - Polres Jajaran : 40 orang.

- 7) Bidang Brimob, tercapai 0,86 % dari target 0,86%.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi bahwa:

- menyiagakan



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- a) menyiagakan Unit siaga di tiap kesatuan SatBrimob Polda Jatim sebanyak 12 Unit SAR di Subden (Kompi), 1 Unit KBR pada Den Gegana;
- b) membuat 1 laporan Quick respon JIBOM;
- c) membuat 1 laporan hasil peningkatan *back up* Kewilayahan terhadap gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;
- d) membuat 1 laporan hasil peningkatan layanan telepon siaga Brimob 24 jam di Polda Jatim.

BAB IV

PROGRAM QUICK WINS

1. Program Revolusi Mental Aparatur

Dimana kegiatan Polisi sebagai penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik telah dilaksanakan sebanyak 25 personel agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir mulai dari tingkat Polda sampai dengan Polres jajaran guna peningkatan kemampuan fasilitator kepada para Perwira diseluruh Polres jajaran yang menghasilkan komitmen bersama yang dibuat oleh para peserta.

2. Program Penguatan Pengawasan.

Penetapan Zona Integritas menuju WBK tingkat Satker Polda Jatim dan Polres jajaran. Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Polda Jatim terbukti dalam apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Menteri PAN dan RB kepada 6 Polres Yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jombang, Bangkalan, Madiun, Blitar Kota, dan Kediri memperoleh predikat Satwil sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Penetapan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 3 Polres Yaitu Polres Lamongan, Mojokerto, dan Malang, yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Tebet Jakarta Selatan.

3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Telah dilakukan penilaian LKIP Polda Jatim Tahun 2018 dengan Nilai sebesar 78,95% dari 9 (sembilan) sasaran strategis dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja, dimana untuk penilaian LKIP tahun 2019 belum dinilai oleh Mabes Polri.

4. Program Penguatan Kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah, sedangkan Peraturan Kapolri Nomor: 23/X/2010 Tahun 2010 tentang SOTK tingkat Polres dan Polsek masih berlaku.

5. Program Penguatan Tata Laksana.

Pengintegrasian *E-Dokument/e-office* pada tingkat 28 S Satker Polda Jatim dan 39 Polres, program unggulan dari Satker Biro SDM : *e gaji berkala* dan *e RIM*, serta Satker Iwasda : *e dumas*).

6. Program



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



6. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
Pemberlakuan promosi jabatan terbuka di lingkungan Polda dan Polres:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.
Peraturan Kapolri tentang promosi terbuka di lingkungan Polri, belum tersusun sehingga Biro SDM Polda Jatim masih mempedomani Kep Kapolri Nomor: Kep/1364/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang promosi jabatan secara terbuka di lingkungan Polri;
 - b. penerapan sistem promosi secara terbuka kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan.
 - 1) penyelenggaraan Assesment Center Polri, dengan melaksanakan promosi jabatan terbuka ditingkat Polda dan Satwil jajaran, sesuai Surat Telegram Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: ST/57/I/KEP/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang penawaran Assessment jabatan Wakapolres T.A. 2019 di lingkungan Polda Jatim, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: KEP/1715/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Promosi Jabatan Secara Terbuka Jabatan Kabagsumda T.A. 2019 di lingkungan Polda Jatim dan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor: Kep/760/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan promosi jabatan secara terbuka jabatan Kapolsek Urban T.A. 2019 di lingkungan Polda Jatim;
 - 2) sudah diatur naskah penerapan Tim Pengawasan promosi jabatan, sebanyak 1 Naskah laporan tim pengawasan.
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
Revisi Peraturan Kapolri nomor 26 tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan Kepolisian, selama Tahun 2019 dilaksanakannya 1 kali harmonisasi dan sinkronisasi Perkap tentang e *Dumas* dengan hasil 95%.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - a. Bidang Lantas:
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di 38 Satpas Polda Jatim terutama Polres jajaran yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM sejumlah 12 Polres yaitu Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Jember, Gresik, Malang, Mojokerto, Lamongan, Malang Kota, Banyuwangi, Situbondo, Batu, Mojokerto Kota, Bojonegoro, Tuban, Trenggalek, Pelabuhan Tanjung Perak, Jombang, Madiun, Kediri, Blitar Kota dan Bangkalan;
 - b. Bidang Intelkam:
Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SKCK di Polda Jatim dan 39 Polres dengan membangun dan mengimplementasikan aplikasi registrasi SKCK Online di Polda, Polres jajaran dan Polsek;
 - c. Bidang



REFORMASI BIROKRASI POLRI POLDA JATIM



- c. Bidang Binmas:
Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) dengan pengadaan Unitmobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres, sudah dilaksanakan sejumlah 1 Unit di Polda Jatim dan Polres jajaran 39 Unit;
- d. Bidang Polairud:
Pelayanan masyarakat di wilayah pelabuhan berbasis teknologi informasi (aplikasi Smartphone) di wilayah pelabuhan pencurian diatas kapal di 10 *Hot Spot* area prioritas dan diluar *Hot Spot* berdasarkan laporan hasil kegiatan pengamanan sejumlah 3.298 giat patroli. Dengan demikian Ditpolairud

Polda Jatim berhasil menekan kejadian pencurian di atas kapal di area Hotspot Prioritas; Kegiatan Polmas Perairan dan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;
- e. Bidang Sabhara:
Melaksanakan patroli dialogis di seluruh jajaran kewilayahan. Laporan hasil giat pengaturan : 17.986 kali, Penjagaan : 15.146 kali Pengawalan : 35 kali, Patroli : 28.126 kali, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan sudah dilaksanakan;
- f. Bidang Reskrim:
Pelayanan masyarakat dalam pemberian SP2HP Online dan Laporan hasil monitoring SP2HP Online di Polda Jatim dan Polres jajaran sudah dilaksanakan;
- g. Bidang Brimob:
Quick Respon Jibom, bantuan SAR dan KBR Sat Brimob Polda Jatim sebanyak 3 Unit SAR di Subden (Kompil), 1 Unit KBR pada Den Gegana untuk penanganan bencana alam/SAR, Jibom dan KBR (kimia biologi radio aktif).

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. pelaksanaan RBP dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas menuju Polri yang profesional, Modern dan terpercaya sebagaimana sasaran akhir pada pelaksanaan RBP gelombang III tahun 2016-2019, periode tahun 2019 di Polda Jatim sudah dilaksanakan dengan baik, dengan nilai total pengungkit 56,4% (kategori A= memuaskan).

- b. penilaian monitoring dan evaluasi RBP adalah sebagai berikut:

Total Komponen pengungkit mendapatkan nilai 56,4 % dari bobot 60 % yang terdiri dari :

- a) program yang sesuai target yaitu :

- (1) program I mencapai 5% dari bobot 5%;
- (2) program III mencapai 6% dari bobot 6%;
- (3) program IV mencapai 6% dari bobot 6%;
- (4) program V mencapai 5% dari bobot 5%;
- (5) program VII mencapai 5% dari bobot 5%.

- b) program yang belum memenuhi target yaitu:

- (1) program II tercapai 11,88% dari bobot 12%

Pembangunan unit kerja untuk memperoleh Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Penetapan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Target yang diharapkan 18 satker/satwil, namun pada Tahun 2019 Polda Jatim mendapatkan WBK sebanyak 6 Polres yaitu Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jombang, Bangkalan, Madiun, Blitar Kota, dan Kediri serta mendapatkan WBBM sebanyak 3 Polres Yaitu Polres Lamongan, Mojokerto, dan Malang. Sehingga untuk mencapai target masih kurang 3 satker /satwil.

(2) Program VI

- (2) program VI mencapai 11,56% dari bobot 15,0%;
 - (a) perumusan dan kebijakan system rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi yaitu belum melaksanakan rekrutmen sebesar 10% anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan Negara, pesisir dan pulau-pulau terluar, dengan target 1 orang namun belum bisa dilaksanakan;
 - (b) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment centre, yaitu belum melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi assessor tingkat Polda, dengan target 1 orang, namun belum bisa dilaksanakan;
 - (c) Penguatan system dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.
 Belum melaksanakan MoU bidang pendidikan dan latihan guna pengembangan kapasitas SDM Polri dalam pelaksanaan tugas, target 1 kali, namun belum bisa dilaksanakan.
- (3) program VIII mencapai 5,8% dari bobot 6,0%
 - (a) Lalu Lintas dalam rangka pengembangan SIM *online* melaksanakan penambahan unit mobil SIM keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat target 1 kendaraan, namun belum bisa dilaksanakan;
 - (b) Polair dalam rangka peningkatan hotspot 10 area prioritas area labuh jangkar kapal niaga di wilayah pelabuhan dengan target pelaksanaan kegiatan pengamanan sebanyak 3600 namun terlaksana 3298;
 - (c) Polair dalam rangka giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar berpenghuni target melaksanakan giat 720 kali, dan terlaksana 600 kali.

2. Rekomendasi.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan Program-program yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III 2016-2019 periode Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Program II: Penguatan Sistem Pengawasan.
 Perlu kiranya Itwasda Polda Jatim berkoordinasi dengan Biro Rena untuk meningkatkan asistensi dan supervisi terhadap satker/satwil yang belum mendapatkan WBK/WBBM, sehingga kedepan perolehan WBK/WBBM dapat ditingkatkan;

b. Program

- b. Program VI: Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.
- (1) Karo SDM kiranya perlu melaksanakan rekrutmen sebesar 10% anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan Negara, pesisir dan pulau-pulau terluar sesuai dengan target yang direncanakan sejumlah 1 orang;
 - (2) Karo SDM agar melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi assessor tingkat Polda. sesuai target 1 orang;
 - (3) Karo SDM agar melaksanakan MOU bidang pendidikan dan latihan dengan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dalam pelaksanaan tugas.
- c. Program VIII: Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (1) Ditlantas kiranya perlu melaksanakan penambahan unit mobil SIM keliling tingkat Polres dalam rangka pengembangan SIM *online* untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai target 1 kendaraan;
 - (2) Ditpolair meningkatkan kegiatan pengamanan dalam rangka peningkatan hotspot 10 area prioritas dan area labuh jangkar kapal niaga di wilayah pelabuhan 302 kali kegiatan;
 - (3) Ditpoalir perlu kiranya meningkatkan kegiatan dalam rangka giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar berpenghuni 120 kali kegiatan.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Polda Jatim, periode Tahun 2021 disusun sebagai bahan evaluasi target pencapaian rencana aksi sebagaimana telah tertuang dalam rencana aksi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Polri 2021 dan bahan masukan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

Surabaya, Desember 2021
KARORENA POLDA JATIM
Selaku
KETUA TIM PELAKSANA RBP